

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEDUA JUNI 2011

Minggu II Juni 2011 ini DPR tetap berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

## Legislasi

Pada masa sidang ini, Dewan akan segera menyelesaikan 6 RUU yang diperkirakan akan selesai pada akhir Juni ini. RUU yang dimaksud adalah: RUU tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang perubahan atas UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, RUU tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 2009 tentang Sistem Resi Gudang, RUU tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, dan RUU tentang Peraturan perundang-Undangan.

Memang diantara beberapa RUU tersebut, ada permasalahan krusial, khususnya DPR dengan pemerintah, namun DPR berharap permasalahan ini diselesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian, kalau perlu dengan melibatkan Pimpinan Dewan. RUU tentang Sistem Resi Gudang memang masih depending, berkaitan dengan dana Penjaminan Transaksi Sistem Resi Gudang yang besarnya sebesar Rp. 1,5 Triliun. Hal ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan.

RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dua (2) permasalahan yang depending yaitu masalah Lembaga Kliring dan masalah Sanksi.

Ada satu rancangan UU atas usul inisiatif dari Komisi II, yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diketahui, Prolegnas 2011 mengamanatkan tentang perlu-nya perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1974 tentang



Pokok-pokok Kepegawaian yang menjadi salah satu prioritas usul DPR-RI. Komisi II telah ditugaskan untuk melaksanakan amanat Prolegnas ini. Selanjutnya Komisi II telah menugaskan kepada Panitia Kerja untuk merumuskan draft RUU sekaligus naskah akademiknya (NA).

UU No. 8 tahun 1974 telah dirubah dengan UU No. 43 tahun 1999 dan akan direvisi kembali. Karena materi perubahan yang akan dilakukan melebihi 50%, baik substansi maupun sistematikanya, maka revisi yang dilakukan dengan mengganti kedua UU diatas dengan judul baru yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

Penyempurnaan UU Kepegawaian yang akan dilakukan karena alasan strategis antara lain; UU yang ada dan berlaku selama ini belum dapat mewujudkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen kepegawaian yang diterapkan belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, serta integritas dan kompetensi, baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pola karir, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai hingga penetapan pension. Secara politis, aparaturnegara masih mudah diintervensi oleh kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek, sehingga melemahkan penyelenggaraan pelayanan publik. Belum mampu menjalankan peran yang optimal sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta masih lemahnya penegakan disiplin dan kode etik.

RUU inisiatif Komisi II ini masih akan diproses sesuai dengan mekanisme Dewan, yaitu dilakukan harmonisasi dengan Badan Legislasi sebelum diambil keputusan menjadi RUU inisiatif DPR dan dibahas bersama Pemerintah.

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

## Anggaran

Dalam Buletin minggu yang lalu telah disampaikan ringkDdalam minggu ini, Komisi-Komisi Dewan telah melakukan Rapat Kerja dengan pasangan kerja masing-masing untuk melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2012 sebagai tindak lanjut dari keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok kebijakan Fiskal tahun 2012. Agenda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi adalah pembahasan tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Minggu depan, hasil rapat kerja masing-masing Komisi dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPR-RI

Berkaitan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN, Rapat Paripurna DPR tanggal 31 Mei memiliki agenda mendengarkan jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012. Inti penjelasan adalah sebagai berikut.

Meskipun kinerja ekonomi tahun 2012 cukup prospektif, namun tetap harus mewaspada tantangan dari sisi global maupun domestik. Dari sisi global, laju pertumbuhan ekonomi global yang belum merata, masih berlanjutnya krisis Eropa serta tingginya harga minyak mentah dan komoditas pangan. Sedangkan dari sisi domestik, tantangan berat 2012 adalah perbaikan yang mendasar atas iklim investasi dalam rangka meningkatkan investasi langsung guna meningkatkan kinerja sektor riil dan pembukaan akses lapangan kerja baru.

Pencapaian sasaran pembangunan 2012 akan dilakukan melalui strategi empat (4) jalur, yaitu mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas kesempatan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*), serta merespon dan memitigasi perubahan iklim (*pro-environment*).

Pencapaian pertumbuhan ekonomi diatas 6,5%-6,9% tahun 2012 merupakan tantangan yang cukup besar. Beberapa langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2012, Pemerintah telah menyiapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan alokasi anggaran ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan-kebijakan tersebut tercermin dalam peningkatan alokasi yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur, berlanjutnya program pengentasan kemiskinan dan bantuan subsidi untuk pertanian. Keseluruhan kebijakan tersebut akan mendukung upaya untuk memperluas lapangan kerja dan

selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

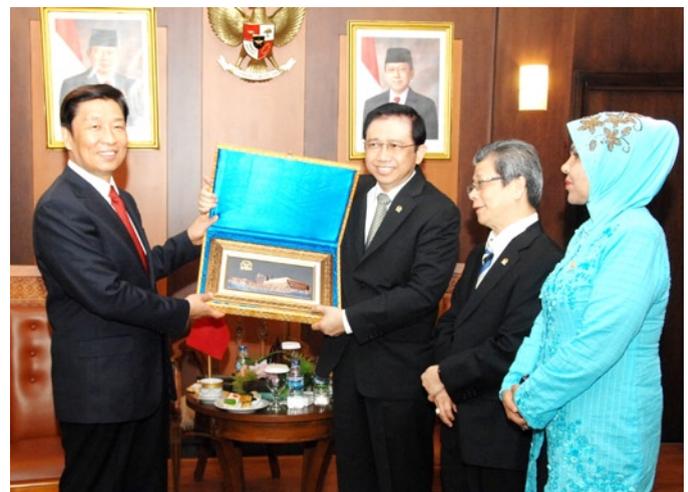
Pemerintah menyambut baik ajakan Dewan untuk bersama-sama melakukan pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2012 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan tanggungjawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia yang terbentang di pundak pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## Pengawasan

Tim Pengawas terhadap tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket tentang Pengusutan Kasus Bank Century telah mengadakan rapat kembali pada 8 Juni 2011. Kesimpulan hasil rapat tersebut adalah: [1] Tim Pengawas mengharapkan adanya koordinasi yang nyata antara 3 lembaga penegak hukum yang dipimpin oleh KPK. Hal ini dalam rangka mensolid-kan definisi tindak pidana yang terjadi dalam Kasus Bank Century. [2] Tim Pengawas mengagendakan rapat lanjutan dengan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK, pada tanggal 15 Juni. [3] Tim Pengawas akan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Putusan Pengadilan atas Hesham Al Warraq dan Ravat Ali Rizvi.

## Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri

Rapat Pimpinan DPR 23 mei 2011 telah membicarakan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan program kunjungan kerja ke luar negeri bagi alat-alat kelengkapan DPR. Kesepakatan yang diambil dalam Rapim sebagai berikut: [1] Kunker Luar Negeri, terkait pelaksanaan fungsi legislasi, pimpinan akan memberikan persetujuan apabila rencana



kunjungan Departemen Organisasi Partai Komunis China

Kunker Luar Negeri dimaksud benar-benar diperlukan dan memenuhi persyaratan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 peraturan tata tertib butir 5, yaitu adanya urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan antara negara tujuan dengan materi RUU. [2] Kunker ke luar negeri yang berkaitan dengan tugas-tugas BKSAP dan Komisi I dapat dilaksanakan sebagai implementasi dari program diplomasi parlemen dalam rangka memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. [3] Kunker ke luar negeri dalam rangka Muhibah Pimpinan DPR atas undangan Ketua Parlemen negara sahabat, dengan asas resiprositas, dapat dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan dan kerjasama antara DPR dengan parlemen negara sahabat. [4] pengiriman delegasi ke luar negeri yang dilaksanakan oleh AKD diluar 1, 2, 3, untuk sementara waktu **ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya** sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Dewan. Kesepakatan Rapim ini telah diberitahukan kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan.

### Diplomasi Parlemen

**AIPA Caucus.** Pertemuan 3rd ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus telah dilaksanakan di Manila, Filipina, pada 31 Mei-3 Juni 2011. Delegasi DPR-RI dipimpin oleh Ketua BKSAP Hidayat Nur wahid dengan didampingi oleh Bobby Adhityo Rizaldi. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai usaha AIPA untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya harmonisasi hukum atas langkah-langkah dalam penanganan bencana dan perlindungan anak. Diakui bahwa saat ini ASEAN menghadapi tantangan yang makin nyata sebagai dampak dari perubahan iklim dengan semakin meningkatnya intensitas bencana di ASEAN. Lebih lanjut, disadari bahwa perlindungan terhadap hak anak di ASEAN dirasa masih kurang memadai. Untuk itu, AIPA perlu untuk meningkatkan kerjasama dan melaksanakan upaya bersama untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut.

Terkait pembahasan tentang *Welfare and Protection of Children*, masing-masing delegasi menyampaikan presentasi mengenai upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Beberapa isu prinsip



Rapat Tim Pengawas Kasus Century

yang menjadi pembahasan dalam sesi ini antara lain mengenai [a] perlunya kementerian khusus yang menangani permasalahan perlindungan kepada anak; [b] mendorong dan bekerja sama dengan eksekutif untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan kepada anak; dan [c] pelibatan yang aktif dari sektor swasta dan CSO. Secara regional, pertemuan sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar-Parlemen dalam hal perlindungan kepada anak melalui institusionalisasi kebijakan di masing-masing negara untuk *sharing best practices*.

Dalam pembahasan status dan perkembangan implementasi dari berbagai Resolusi AIPA GA ke-31, secara garis besar, parlemen masing-masing negara anggota AIPA telah menyampaikan seluruh Resolusi Sidang ke-31 AIPA kepada pemerintah (lembaga eksekutif) untuk diimplementasikan. Legislatif dan eksekutif akan bekerja sama dalam *follow up* resolusi-resolusi dimaksud. Namun demikian, disadari bahwa belum semua negara anggota ASEAN telah mengimplementasikan Resolusi Sidang umum ke-31 AIPA. Untuk itu Sidang Umum, selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan resolusi-resolusi yang lebih *implementable* dan mengarah pada pendekatan yang *people oriented and people-centered*.

**Kunjungan delegasi Departemen Organisasi Partai Komunis China.** Pada awal Juni ini, Ketua DPR-RI telah menerima delegasi Departemen Organisasi Partai Komunis China yang dipimpin oleh Mr. Li Yungchao. Pokok-pokok pembicaraan antara lain berkaitan dengan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk hubungan politik, ekonomi dan perdagangan. Indonesia dipandang memiliki banyak potensi untuk melakukan kerjasama dengan China. China mengakui peranan penting Indonesia dalam ASEAN. China akan memanfaatkan momentum keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun 2011 untuk kepentingan hubungan ASEAN-China yang lebih baik lagi. China berkepentingan untuk mendorong memajukan hubungan ASEAN-China.

Pada kesempatan ini, Ketua DPR menyampaikan 2 hal penting kepada delegasi yaitu tentang deficit perdagangan Indonesia-China dalam konteks ACFTA dan tentang pesawat produk china MA-60. Mengenai defisit perdagangan, Ketua DPR meminta supaya dicarikan formula hubungan perdagangan yang seimbang agar bermantapan bagi kedua negara. Mengenai pesawat MA-60, Ketua DPR meminta kesungguhan China untuk membantu dan meneliti secara teknis Pesawat MA-60, terutama setelah terjadinya kecelakaan Pesawat MA-60 milik Maskapai Penerbangan Merpati di Papua bulan April lalu.

Terhadap kedua hal ini, terhadap Pesawat MA-60, delegasi mengatakan akan melakukan koordinasi dan penelitian yang sungguh-sungguh, khususnya berkaitan dengan masalah teknis pesawat, demi keamanan/keselamatan penggunaan pesawat ini. Delegasi juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kerjasama parlemen antara China dan Indonesia.\*

# DPR Segera Panggil Pemilik Tambak Eks-Dipasena

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, persoalan tambak eks-Dipasena telah menjadi perhatian khusus DPR. karena itu, Komisi IV DPR akan melakukan kunjungan lapangan spesifik untuk melihat persoalan secara menyeluruh.

“Teman-teman Komisi IV DPR telah menyampaikan persoalan tersebut karena itu kita mendorong penyelesaian persoalan itu,” kata Pramono saat menerima Walhi, di Gedung Nusantara III, Senin, (6/6).

Dia menambahkan, DPR akan segera memanggil pemilik Dipasena dan segera melakukan kunlap spesifik untuk mengetahui persoalan lebih mendalam.

Terkait persoalan konflik tanah antara warga Sukamulya dengan TNI AU, Menurutnya, apa yang terjadi di sukamulya juga terjadi di kebun, Jawa Timur. karena maraknya kasus tanah dengan TNI, DPR akan segera memanggil pemerintah untuk duduk bersama antara Menpan dan RB, BPN, Menhan, untuk menemukan solusi persoalan tanah itu.

Sementara Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy (F-PPP) mengatakan, pada tanggal 9 Juni nanti akan mengadakan Raker dengan Menteri Kelautan Fadel Muhammad guna mengetahui persoalan eks Dipasena. “Meskipun membahas anggaran tentu akan kita pertanyakan dan kemajuan persoalan eks dipasena tersebut,” paparnya.

Dia menambahkan, pada tanggal 17-19 Juni, tim Komisi IV DPR akan mengadakan kunjungan lapangan spesifik ke tambak eks-dipasena tersebut. (si) foto:As/parle



Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memberikan bantuan kepada salah satu warga eks\_Dipasena



Warga eks-Dipasena saat berdialog dengan anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya

# AS Tawarkan Program Kerjasama Legislasi

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID ingin menawarkan program kerjasama Legislasi dalam rangka membantu Indonesia dalam mendorong penyelesaian Legislasi.



Wakil ketua DPR Pramono Anung saat menerima Director Office of Democracy and Government (DG) USAID Mr. Milles Toder di Gedung Nusantara III DPR

“Kita mengharapkan program ini bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota DPR,” jelasnya saat menerima Director office of de-

mocracy and government (DG) USAID Mr. Miles Toder, di Gedung Nusantara III, Rabu, (8/6).

Menurutnya, bentuk kerjasamanya

berupa advice program untuk anggota parlemen kita yang sebagian besar merupakan anggota baru.

Dia menambahkan, saat ini DPR sudah memiliki staf ahli namun masih belum menjawab tuntutan penyelesaian legislasi. Karena itu, terangnya, DPR berniat menambah staf ahli sebanyak 3 orang, untuk pimpinan sejumlah 7 orang staf ahli guna mempercepat penyelesaian target legislasi DPR.

pada kesempatan itu, Pramono menerangkan dalam menyusun legislasi DPR juga melibatkan akademisi dalam penyusunan naskah akademis dari RUU tersebut.

Seperti kita ketahui, DPR telah melakukan terobosan untuk mengejar target legislasi dengan menjadikan hari Rabu-Kamis khusus hari legislatif dikarenakan masih minimnya pencapaian Prolegnas. Untuk tahun 2010 saja dari target 70 RUU yang menjadi prioritas DPR berhasil menuntaskan 16 RUU. (si/as) foto:as

## DPR Desak Pemerintah Susun Standarisasi Pelayanan Jamkesmas

Program Jamkesmas telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian di tahun 2008 berganti nama Jamkesmas. Program tersebut telah memasuki tahun ketiga. Perbaikan-perbaikan mendasar telah dilakukan sebagai upaya pengendalian biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu akan tetapi masih saja dalam pelaksanaan di lapangan masih tidak tepat sasaran dan tujuannya.

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pelaksanaan Jamkesmas diberbagai daerah masih belum seragam. Karena itu kedepannya harus ada standarisasi

pelaksanaan Jamkesmas di kabupaten/kota dengan fasilitas bangsal kelas III dari RSUD setempat.

“Sekarang ini belum seimbang antara okupansi rawat inap dengan

peserta jamkesmas. Persoalan dilapangan seringkali ruangnya sangat terbatas dan sempit,”paparnya.

Artinya apabila dalam satu bangsal hanya ada 11 tempat tidur pasien jika dibandingkan dengan okupansi maka terlihat tidak seimbang dengan coverage pelayanan di RS daerah tersebut. “tiap harinya tentu sangat tidak seimbang apalagi jika dilihat rujukan jamkesmas yang di rujuk untuk rawat inap. bahkan seringkali masyarakat kita antri diluar bangsal kelas III de-

ngan kondisi memperhatikan,”ujarnya,

Ke depan, DPR mengusulkan kerja sama dan sinergitas serta keseimbangan jamkesmas di setiap daerah, terkait dengan jumlah bangsal dan fasilitas yang ada. Selain itu, perlu standarisasi mengenai kebutuhan ruangan pelayanan bangsalkelas III dengan rata-rata keseharian masyarakat pengguna jamkesmas yang berobat jalan dan rawat inap. “Misalnya dalam satu hari terdapat 9-10 pasien rawat inap. Maka, tingkat okupansi harus disesuaikan, yakni sebanyak 10 pasien ditambah 30% menjadi 13 tempat tidur untuk pasien rawat inap dalam satu hari,” tegasnya.

Jamkesmas, lanjutnya, merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menyangkut aspek kepedulian negara yang berusaha mengcover kesehatan rakyatnya. Sesuai peruntukannya memang ditujukan untuk orang miskin dan tidak mampu. Kedepannya, perlu ada standarisasi besaran kucuran dana jamkesmas yang disesuaikan dengan tingkat gradasi kemampuan masing-masing pelayanan integritas pemerintah kabupaten dan kota melalui indeks daerah tersebut.

“Jangan sampai kucuran dana Jamkesmas tidak jelas, dan ada daerah yang sangat perlu cakupan jamkesmas mendapat lebih sedikit dibandingkan daerah perkotaan yang memiliki kesadaran kesehatannya sudah tinggi,”terangnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, layanan jamkesmas, terutama di rumah sakit umum daerah (RSUD), sangat diperlukan masyarakat dan merupakan salah satu program penting, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Taufik menilai fasilitas RSUD di kabupaten/ kota kurang memadai akibat keterbatasan alokasi dana APBD. Alhasil, terjadi ketidakseimbangan layanan jamkesmas di daerah.

“Jamkesmas biasanya terhambat oleh penyediaan dan keterbatasan ruang serta fasilitas di RSUD. Karena itu, ketersediaan APBD kabupaten/ kota perlu disinergikan dengan dana jamkesmas yang disediakan oleh pusat,” ujar Taufik.



Wakil ketua DPR RI Ir. Taufik Kurniawan melakukan sidak pelayanan Jamkesmas di salah satu RSUD baru-baru ini

Dia menambahkan, pemerintah harus mengembangkan sistem online berkaitan dengan sistem audit pelayanan jamkesmas. Melalui cara ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan klaim masalah pungutan liar jamkesmas. “Kedepan fungsi pelayanan Jamkesmas dapat lebih kontinyu serta di lakukan auditing dari BPK terkait Jamkesmas,”ujarnya.

### Serahkan KTP

Keluhan masyarakat terhadap Askeskin dahulu, sangat berbeda dengan proses administrasi jamkesmas saat ini, Masyarakat sekarang tinggal menyerahkan KTP dan terdaftar menjadi peserta jamkesmas maka mereka sudah dapat memperoleh pelayanan dari jamkesmas.

“Sekarang ini memang ada kemudahan untuk birokrasi jamkesmas, tetapi disisi lain tidak bisa dipungkiri masih banyak hal kasus-kasus muncul,”jelas Taufik. Hal tersebut bisa saja terjadi dari proses audit dikurkannya dana Kemenkes sampai RS yang bersangkutan. Dia menegaskan, perlu ada parameter yang jelas sehingga tidak terjadi penyelewengan

Kedepan, harus ada sistem online maksudnya jumlah kucuran dana yang disampaikan RS umum daerah juga harus bisa dimonitoring dengan sistem online. Dia mencontohkan terdapat

kasus RS di Jantungpura peserta Jamkesmas harus membayar padahal semuanya Free (gratis), juga ada kasus penyalahgunaan klaim yang tidak sesuai di lapangan.

“Perlu ada sistem audit dengan BPK sehingga harapan yang diinginkan perlu diimbangi dengan aspek akuntabilitas ke public termasuk audit integritas dan pelayanan,”terangnya.

Kepesertaan program jamkesmas dilakukan secara nasional oleh Menkes berdasarkan kuota, sementara untuk kabupaten atau kota oleh Bupati. “petunjuk pelaksanaan jamkesmas mengenai keputusan penyelenggara dana Jamkesmas yang diputuskan didalam Kepmenkes Nomor.515/ Menkes/SK/ III/2011 Tentang penerima dana penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pelayanan dasar di tingkat Kabupaten,”tuturnya.

Tanggapannya mengenai kerjasama jamkesmas dengan RS Swasta, Taufik mengatakan prosesnya masih bertahap artinya sudah terdapat pelayanan kesehatan untuk lapisan masyarakat “Kita masih menggodok pelayanan kesehatan ini, karena itu keberhasilan Jamkesmas menentukan keberhasilan BPJS kedepannya. Kalau Jamkesmas pelayannya tidak jalan bagaimana bisa meningkatkan BPJS. Ini sangat penting mengingat BPJS tidak hanya kesehatan tetapi juga adanya jaminan sosial, hari tua, kecelakaan,”ungkapnya. (doc parle)

# Komisi IV DPR Dukung Program Klaster Pro Rakyat Untuk Peningkatan Kehidupan Nelayan

Komisi IV DPR sangat mendukung dengan adanya program peningkatan klaster Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengarah pro rakyat dalam rangka menuju kearah peningkatan kehidupan rakyat nelayan.



Ketua komisi IV DPR H.M. Romahurmuzy

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR yang baru H.M. Romahurmuzy menggantikan Ketua lama Akhmad Muqowam. Pernyataan ini disampaikan pada saat Rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR Senayan Jakarta dan Raru, (8/06) malam.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy juga meminta, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan data penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan serta program bantuan sosial lainnya kepada Komisi IV DPR paling lambat satu minggu terhitung mulai rapat kerja hari ini, dan selanjutnya

akan dievaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksud.

Romahurmuzy mengatakan, bahwa Komisi sangat memberikan apresiasi kepada menteri kelautan atas serapan APBN tahun 2010 sebesar 3,230 triliun rupiah atau 95,15 persen dari total pagu APBN tahun 2010 sebesar 3,472 triliun rupiah untuk menindaklanjutinya, termasuk rekomendasi atas berbadai temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikatakan juga bahwa Komisi IV DPR telah menerima usulan rencana pengajuan RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 untuk program pembangunan kelautan dan perikanan, baik yang ber-

sumber dari APBN, rupiah murni maupun pinjaman hibah luar negeri, yang kemudian akan ditindaklanjuti pembahasannya dalam rapat kerja/rapat dengan pendapat di Komisi IV DPR.

Dalam kesimpulan hasil rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan beberapa poin antara lain, komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam menyusun kegiatan dan program kerja dalam RAPBN 2012 dapat mengakomodir usulan program dan kegiatan dari hasil kunjungan lapangan Komisi IV DPR.

Komisi IV DPR juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kegiatan PUMP mempertimbangkan dukungan sarana dan prasarana serta perluasan pasar yang memadai, selain itu Komisi IV DPR juga meminta agar usulan pagu indikatif kementerian Kelautan dan Perikanan pada RAPBN 2012 sebesar 5,9 triliun rupiah lebih, Komisi IV DPR memberikan kesempatan agar usulan anggaran tambahan dan selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 10 Juni 2011, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dalam pembahasan pendahuluan.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, PUMP perikanan tangkap telah disalurkan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan sebanyak 285 KUB di 32 Kabupaten/kota di 18 Propinsi, juga telah dilaksanakan forum wirausaha budidaya dengan daerah dalam rangka penyiapan pokdakan calon penerima bantuan langsung, ujar Fadel.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad juga menambahkan, PUMP pengolahan juga telah disalurkan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan untuk 80 Poklamsar di 8 Kabupaten/Kota di 5 propinsi serta dalam tahap identifikasi kelompok calon penerima bantuan langsung. (Spy) foto:spy

# Komisi VII Pantau Langsung SPDN di Kab. Lamongan

Adanya kabar yang memberitakan SPDN di Kab. Lamongan, tepatnya di Brondong, sering mengalami kurangnya pasokan solar, membawa anggota Komisi VII melakukan Kunjungan Spesifik ke SPDN tersebut

Dalam kunjungannya kali ini Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI yang diketuai oleh Sutan Sukarnotomo (F-PD) mengatakan, ingin membuktikan dan mengetahui langsung keadaan pasokan BBM di daerah, terutama untuk para nelayan.

“Tujuan kami mendatangi SPDN di Brondong ini adalah sebagai langkah lanjutan kami yang sebelumnya telah kami lakukan untuk memantau pasokan Solar di SPDN-SPDN daerah yang sebelumnya telah kami lakukan di Kab. Indramayu dan Cirebon,”terangnya saat memantau langsung lokasi SPDN Brondong, Senin (30/5).

Kunjungan Spesifik kali ini yang diikuti oleh Azwir Dainy Tara (F-PD),

Teuku Irwan (F-PD), Heriyanto (F-PD), Irvansyah (F-PDIP), Nur Yasin (F-PKB), Ali Kastela (F-Hanura), membuktikan bahwa setiap bulannya pasokan solar di SPBN Brondong memang selalu mengalami kekurangan.

“Biasanya setiap minggu ke-III di setiap bulannya, persediaan solar di SPDN kami telah habis, dan akan diisi kembali pada awal bulan berikutnya,” jelas Kasiman, Ketua Koperasi KPRI Nusantara Jaya yang mengelola SPDN Kab. Lamongan.

Habisnya solar tersebut pada minggu ke-III, telah berlangsung lama dan Koperasi KPRI Nusantara Jaya telah berniat untuk menambahkan pasokan solarnya, tetapi karena terpatok masalah keuangan, hingga saat ini niat baik tersebut belum dapat terpenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Komisi VII yang diwakili oleh Azwir Dainy Tara mengatakan, dirinya beserta rekan lainnya siap untuk mengawal koperasi KPRI Nusantara Jaya agar bisa mendapatkan pinjaman untuk menambah pasokan solar, agar kekurangan pasokan solar selama ini dapat ditanggulangi.

“Komisi VII siap untuk mengawal dan membantu Koperasi KPRI Nusantara Jaya, untuk dapat menambahkan pasokan solarnya, agar kebutuhan para nelayan dapat terpenuhi dan tidak lagi banyak nelayan yang membeli di SPBU, yang bisa terkena resiko ditangkap polisi,” jelasnya.

Jumlah alokasi pasokan solar yang ada selama ini, sejak Juni 2009 di SPDN Brondong perbulannya sebesar 504 KL, tetapi karena banyaknya kapal yang ada di Kab. Lamongan sehingga, jumlah pasokan tersebut hanya bisa menutupi kebutuhan 3 kabupaten saja, sedangkan masih tersisa ada sekitar 14 kabupaten.

“Kami berharap permasalahan kekurangan alokasi BBM di Brondong ini dapat segera terselesaikan, agar kebutuhan nelayan dapat segera terlayani secara optimal, dan para nelayan dapat melaut dan menghasilkan hasil laut yang banyak,” pungkasnya. (ra)

foto:Ra/parle



Rombongan anggota Komisi VII DPR saat melakukan kunjungan spesifik ke SPDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

# Komisi V DPR Kecewa Kinerja Kemenhub



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido

Komisi V DPR RI kecewa terhadap kinerja jajaran Kementerian Perhubungan. Selama kurun waktu hampir dua tahun tidak ada perubahan yang cukup signifikan di kementerian ini dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman di semua moda transportasi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V Rendy Lamadjido (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Selasa (7/6) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

Rendhy mengatakan, bahkan Kementerian Perhubungan dapat dikatakan sebagai mesin pembunuh masyarakat Indonesia terbesar. Sekitar 8 - 15 orang meninggal setiap hari atau rata-rata 34.000 orang setiap tahun masyarakat Indonesia mati sia-sia akibat persoalan transportasi yang bobrok.

Rendhy mengingatkan kementerian ini jangan sebagai ajang untuk suatu proyek-proyek yang dijadikan sasaran oleh pengusaha-pengusaha. "Saya

sepatkat pembangunan itu perlu, tapi jangan pembangunan ini mengikuti kemauan para pengusaha," katanya.

Rendhy menyoroti kinerja Dirjen Perhubungan Udara yang menurutnya programnya tidak jelas. Sebagai contoh pelabuhan internasional Soekarno Hatta yang merupakan wajah Indonesia tidak mencerminkan bandara internasional sama sekali. Bandara ini semrawut, kotor, dan terkesan kumuh. Dia menyayangkan bandara yang dibangun begitu megahnya sekarang tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah.

Seharusnya, kata Rendhy, Kementerian Perhubungan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat yang mencapai 22,4 persen setiap ta-

hun, melebihi kapasitas peningkatan dunia yang hanya 8,2 persen.

Persoalan delay di maskapai penerbangan di Indonesia sudah menjadi makanan sehari-hari. Padahal persoalan delay di penerbangan luar negeri menjadi hal yang sensitif, dimana Pemerintah dapat memberikan peringatan keras terhadap maskapai penerbangan tersebut.

Inti dari persoalan di sini karena kesemrawutan, mulai dari maskapai itu sendiri sampai pelayanan di airport. Kita dapat melihat penumpang yang begitu semrawut, kadang-kadang pindah dari terminal I A ke terminal I B tanpa pemberitahuan, belum lagi menyangkut masalah pelayanan.

"Kami minta persoalan transportasi ini dibenahi, jangan sampai persoalan ini berlarut-larut sehingga menimbulkan korban yang lebih banyak lagi," katanya.

Dia juga mengingatkan dari sisi regulasi Undang-Undang tentang Penerbangan dan Undang-Undang tentang Pelayaran sudah dilakukan direvisi. Semua itu dilakukan untuk penguatan kepada Pemerintah.

Begitu juga dengan program-program yang ada di Dirjen Perhubungan Laut. Rendhy melihat dalam pelaksanaannya banyak program yang mubazir dimana pembangunan pelabuhan ditinggalkan begitu saja tanpa ada peranan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Sangat disayangkan pelabuhan itu ditinggalkan begitu saja seperti kandang sapi," katanya.

Demikian halnya dengan Dirjen Perkeretaapian, menurutnya manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) begitu bobroknya, kecelakaan demi kecelakaan sering terjadi.

Sementara Hikmat Tomet (F-PG) mengusulkan anggaran Tahun 2012 sebaiknya berkesinambungan dengan



Pegawai KA sedang membersihkan salah satu gerbong kereta api dan situasi kemacetan parah di Ibu Kota Jakarta

anggaran 2011, sehingga hasil yang dirasakan masyarakat dapat maksimal.

Dia sependapat, Kementerian Perhubungan menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda sehingga proyek-proyek tersebut tidak menjadi proyek yang mubazir.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, prakiraan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012 sebesar Rp 23,75 triliun. Namun sesuai SEB Menteri Keuangan dan Men PPN/Ka. Bappenas Tahun 2011 Pagu indikatif turun menjadi sebesar Rp 22,78 triliun dari kebutuhan anggaran yang diajukan sebesar Rp 45,49 triliun.

Freddy mengakui, pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dan biaya transportasi yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk wilayah perkotaan.

Selain itu, kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal, dan sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi.

Koordinasi antara sektoral dan

daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini masih parsial untuk mewujudkan “domestic connectivity” yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat.

“Semua itu merupakan permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi transportasi di tahun 2012,” kata Freddy.

Freddy menambahkan, kementeriannya membuat berbagai kebijakan dan strategi, diantaranya mendukung

pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, mendorong partisipasi peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.

Selain itu, memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan angkutan massal. (tt) foto:doc parle



Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi

# Minimarket Mematikan Pedagang Tradisional

Maraknya minimarket yang berada di perkampungan atau di pedesaan yang berdekatan dengan pedagang tradisional akan mematikan pedagang tradisional.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon



Salah satu minimarket di sudut jalan

“Seharusnya pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan membuat klaster-klaster daripada perdagangan tersebut, sehingga yang besar bisa menghidupkan yang kecil dan yang kecil bisa membantu juga yang besar,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Tampubolon saat ditemui Tim Parle di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Ini yang perlu dan harus kita buat suatu kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah, kata Nurdin seraya menambahkan seharusnya minimar-

ket itu yang dikuasai oleh asing ini jangan sampai mematikan pedagang yang kecil. “Itu kunci yang sebenarnya,” tambahnya.

Dalam menuntaskan persoalan tersebut, jelas Nurdin, DPR akan mengundang menteri perdagangan untuk menanyakan sikap pemerintah, karena pedagang-pedagang kecil sudah menjerit dengan kondisi seperti sekarang ini.

Dia meminta menteri perdagangan melihat kondisi riil di lapangan dan mengambil solusinya sehingga

pedagang tradisional tidak kehilangan mata pencahariannya. “Ini harus diperhatikan secara serius, pedagang tradisional itu harus dilindungi dan mereka harus betul-betul diproteksi daripada intervensi ataupun masuknya franchise besar-besar yang bertaraf internasional,” pinta Nurdin.

Terkait dengan masalah perizinan minimarket yang berada di pedesaan, Nurdin menjelaskan, sudah ada aturan tata ruangnya mengenai minimarket maupun franchise. Setiap beberapa kilometer misalnya hanya diperbolehkan franchise seperti matahari, carefour, giant. Tetapi diluar itu bisa minimarket, setelah itu pedagang tradisional supaya ada pasar-pasar atau lokasi-lokasi yang masih ditangani atau digeluti oleh masyarakat pedesaan yang sudah menggantungkan hidupnya dari perdagangan itu. “Kalau semua itu diambil itu sama saja ‘kan menghilangkan daripada kehidupan mereka,” tuturnya.

Dia menambahkan, kalau memang ditemukan perizinan illegal harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nurdin juga meminta kepada kementerian yang bersangkutan dan juga instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti daripada temuan-temuan yang seperti itu.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, ini bisa saja bukan tidak punya izin tapi bisa juga penyalahgunaan izinnya dengan penyalahgunaan wewenang, artinya tidak pada tempatnya. “Ini persoalannya adalah persoalan keadilan karena itu pemerintah harus memperlakukan keadilan merata kepada pedagang kecil kita,” terangnya.

Nurdin berharap terhadap gebrakan dari hypermarket, minimarket dan franchise ini pemerintah harus segera membenahi dan melihat riil di lapangan dan mencari solusi agar pasar tradisional itu jangan sampai kehilangan mata pencahariannya. Ini harus dan secara cepat harus dilaksanakan, tegasnya. (iw)/foto:iw/parle.

# Setjen DPR Bantah Batasi Tugas Wartawan

Sekretariat Jenderal DPR menegaskan, pihaknya tidak melakukan pembatasan terhadap wartawan untuk melakukan tugas peliputan di lembaga perwakilan rakyat itu.

“Selama ini dan sampai hari ini, wartawan bebas meliput di lingkungan DPR dan tidak ada pembatasan sama sekali,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Helmizar dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Sabtu pagi.

Hal itu ditegaskan terkait adanya berita di situs-situs berita online mengenai pembatasan peliputan pers di DPR. Sebagian berita dinilai tendensius.

Salah satu berita yang dinilai memojokkan Setjen DPR menyebutkan “mengenai aturan baru yang dibuat Sekjen itu akan berlaku pekan depan. Bagi jurnalis yang tidak memiliki identitas peliputan di DPR dilarang meliput di DPR. Bukan itu saja akses jurnalis untuk mencari berita dengan berkeliling DPR dibatasi. Jurnalis terancam dituduh Pamdal DPR. Mereka mesti mencari berita dengan berkumpul di dalam press room DPR”.

Terkait hal itu, Helmizar menyatakan, Sekjen tidak membuat aturan mengenai pembatasan wartawan, tetapi wartawan yang sudah terdaftar di Kordinatoriat Press Room DPR, memiliki ID Card yang telah diseleksi oleh Pengurus Kordinatoriat Wartawan DPR bersama dengan Bagian Pemberitaan DPR.

“Wartawan yang belum memiliki ID, tetap bisa meliput di lingkungan DPR dengan menggunakan ID Harian yang disediakan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR untuk meliput seluruh kegiatan di DPR RI,” kata Helmizar.

Bagi yang menggunakan ID Tetap dan ID Harian, bebas melakukan ke-



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Helmizar saat memberikan keterangan pers di Jakarta

giatan jurnalistik di lingkungan DPR.

Mengenai ketentuan seolah jurnalis mesti mencari berita dengan berkumpul di dalam press room DPR, Helmizar menyatakan hal itu tidak benar.

“Para jurnalis bebas mencari berita di lingkungan DPR, di ruang press room hanya untuk mengerjakan hasil liputan,” katanya.

Dia menjelaskan, Pengurus Kordinatoriat Press Room DPR bersama Biro Humas dan Pemberitaan DPR sudah sepakat terhadap kewajiban penggunaan ID Card yang ingin melakukan peliputan di lingkungan DPR.

## Di Lobi

Sebelumnya, Pengurus Press Room DPR menginformasikan kepada para wartawan bahwa mulai minggu depan, mereka boleh memeriksa kesehatan gratis di klinik pelayanan kesehatan DPR. Wartawan yang sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan kartu pers resmi DPR.

Diinformasikan pula bahwa pimpi-



Suasana peliputan wartawan di gedung DPR

nan DPR dan Sekjen DPR telah mengeluarkan kebijakan, yaitu para wartawan tidak boleh duduk atau bekerja di lantai lobi Gedung Nusantara III DPR. Lobi bukan tempat kerja atau tempat “nongkrong”.

Petugas keamanan akan menegur wartawan yang tidak mengindahkan imbauan ini dan diminta mengindahkannya.

Wartawan DPR wajib mengenakan ID Card selama meliput di lingkungan DPR. Petugas keamanan akan memperketat tata cara peliputan dan akan melarang mereka yang tidak punya ID Card meliput di lingkungan parlemen. Kebijakan ini diambil menyusul banyaknya orang yang mengaku wartawan dan memeras anggota dewan. (Antara S023/A011/K004) foto:doc parle

# Komisi III Beri Perhatian Penuh Penanganan Tahanan di Lapas dan Rutan

Kelebihan kapasitas mencapai 45 ribu orang, dan temuan lapangan pada saat kunjungan kerja masih buruknya fasilitas Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia menjadi perhatian Komisi III DPR RI.



Azis Syamsudin Wakil Ketua Komisi III DPR

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2011, pembicaraan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2012 dengan menteri Hukum dan HAM, Ketua LPSK, Sekjen MPR dan KY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/11).

“Saya meminta Pak Menteri benar-benar memperhatikan percepatan pembanguana Lapas secara multi years untuk mengatasi over capacity 45 ribu orang. Kalau kita bicara Lapas dan Rutan kita bicara banyak masalah, fasilitas, sumber daya manusianya,” papar anggota komisi III Dewi Asmara dari FPG.

Ia juga mempertanyakan turunnya anggaran bama (bahan makanan) di Lapas dan Rutan dari Rp.8025 perhari pada tahun 2010 menjadi Rp.7670 pada tahun 2011. Padahal kalau memperhatikan tingkat inflasi dan kenaikan harga, anggaran bama seharusnya dinaikkan, apalagi untuk Lapas atau Rutan di daerah yang masih menggunakan kompor minyak tanah. “Kalau tidak diberi makanan yang benar, wajar saja tingkat keributan tinggi.”

Sementara itu Nurdin anggota

Komisi III dari FPDIP meminta menkumham menetapkan prioritas utama anggaran pada RAPBN tahun 2012. Ia juga meminta penjelasan terkait program pembangunan Lapas dan Rutan yang pernah dicanangkan presiden senilai 1 triliun rupiah. Baginya dari hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia fasilitas yang disediakan untuk para tahanan dan narapidana belum menunjukkan perubahan signifikan.

Keprihatinan yang sama juga disampaikan Azis Syamsudin, wakil ketua Komisi III DPR RI. Ia menyampaikan temuan pada saat kunker para narapidana tidur dilantai tanpa kasur. “Yang lebih mengejutkan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan yang jelas penjara, tapi BNN melakukan penyeragaman transaksi narkoba yang dikelola napi disana,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Menjawab hal ini menkumham Patrialis Akbar menjelaskan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pemerintah telah mengambil kebijakan membangun Lapas dan Rutan dengan anggaran multi years. “APBNP 2010

digunakan untuk membangun 31 unit Lapas dan Rutan baru serta 66 unit pembangunan lanjutan. Jumlah anggaran sekitar 710 milyar, ini bisa menampung over capacity lebih kurang 10 ribu orang,” katanya.

Itu berarti beban kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia yang mencapai 45 ribu orang berkurang menjadi 35 ribu orang. Patrialis meminta dukungan dari komisi III agar pembangunan 31 unit lapas rutan dengan anggaran multi years bisa ditindak lanjuti. Usulan APBNP 2011 yang diajukannya untuk melanjutkan pembangunan sekitar 1,7 triliun rupiah lebih.

Pada bagian lain ia juga memaparkan rencana pembangunan Balai Pemasarakatan khusus untuk anak yang diharapkan efektif dimulai tahun 2012. “Kami juga minta dukungan dari komisi III setelah selesai membahas UU Sistem Peradilan Anak kita perlu memulai membangun Bapas yang harus ada di seluruh kabupaten kota dengan sendirinya ini memiliki implikasi penambahan anggaran, ini tugas kemanusiaan kita.”

## Anggaran LPSK

Anggota komisi III dari FPKS Nasir Jamil meminta pimpinan sidang mempertegas status Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada APBN 2011 anggarannya menjadi bagian dari Dipa Sekretariat Negara. Implikasinya adalah perlu meninjau ulang keberadaan LPSK karena Setneg merupakan mitra kerja dari Komisi II. “Perlu diperjelas dulu jenis kelamin LPSK ini. Tugas kita sebagai mitra selain mengawasi kinerja juga memberi dukungan anggaran,” ujarnya.

Dalam paparannya ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyebut mulai tahun 2011 anggaran LPSK menjadi bagian dari Dipa Setneg. Jadi untuk pembahasan anggaran, lembaganya memperoleh 2 undangan dari komisi II dan komisi III. Ia menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada DPR untuk menyelesaikan dualisme ini. (iky)foto: doc parole

# Baleg Terima Delegasi Pejabat Senior Australia

**D**elegasi LAFIA diterima langsung Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Baleg Achmad Dimiyati Natakusuma dan Anggota Baleg dari F-PD Harry Wicaksana di ruang rapat Baleg, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6)

Dalam sambutannya Mulyono mengharapkan, kunjungan delegasi Australia tersebut dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kedua negara, khususnya dalam memahami secara komprehensif tentang Indonesia dari sisi politik, ekonomi, strategis, dan sosial budaya.

“Melalui kunjungan dan diskusi pada hari ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan undang-undang di Indonesia dan tantangannya. Disamping itu kita dapat melakukan tukar menukar pandangan dan pengalaman sehingga dapat lebih meningkatkan hubungan kedua negara yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” papar Mulyono.

Sedangkan Bob Cotton sebagai pimpinan delegasi menyatakan bahwa ada kepentingan yang besar dari negara Australia terhadap Indonesia. Negara Australia sangat respect terhadap Indonesia dan terhadap Parlemen Indonesia terutama setelah mengalami masa-masa sulit karena krisis keuangan yang lalu. Australia merasa kagum terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

“Australia kagum terhadap perubahan yang sangat drastis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia terutama dalam penguatan dewan dan berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, sehingga ini akan menjadi bahan issue kerjasama yang patut ditingkatkan,” terang Bob.

Dijelaskan Bob bahwa LAFIA merupakan program pelatihan kepemimpinan strategis yang diselenggarakan Australia Public Service Commission (APSC) bekerja sama dengan Australia National University (ANU) dan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan delegasi pejabat senior pemerintah Australia yang tergabung dalam program Leading Australia's Future in Asia Pacific (LAFIA) 2011. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang proses pembuatan undang-undang dan tantangannya.



Baleg DPR RI saat menerima kunjungan delegasi pejabat senior pemerintah Australia

Kedutaan Besar Australia di Jakarta, di Indonesia seperti Lemhanas.

Tujuan program LAFIA adalah untuk mengenal dan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang negara-negara tetangga Australia yang mencakup dimensi politik, ekonomi, strategi dan social budaya.

Sedangkan peserta program LAFIA terdiri atas asisten senior atau wakil menteri dari berbagai departemen di jajaran pemerintah federal Australia. Program ini dimulai sekitar tahun 1980an dibawah perdana menteri Paul Keating yang memang sangat antusias membawa Australia dekat dengan negara-negara Asia. Program LAFIA tahun 2011 ini adalah merupakan program ke VI, dan negara yang dikunjungi selain Indonesia adalah India.

“Pemerintah Australia sekarang tetap melanjutkan program LAFIA

tersebut, agar pemimpin Australia di masa yang akan datang juga mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap negara-negara Asia yang berada di sekitar Australia,” imbuh mantan diplomat senior ini.

Banyak hal yang ditanyakan delegasi mengenai proses pembuatan undang-undang di Indonesia, antara lain bagaimana jika pemerintah menyampaikan suatu Rancangan Undang-undang yang sangat penting untuk dibahas segera di luar prolegnas, apakah masyarakat umum diberikan ruang atau kesempatan untuk memberikan masukan terhadap suatu undang-undang, jika staf ahli di bidang perundang-undangan diperkuat apakah dapat mempercepat suatu pembahasan undang-undang sedangkan di keputusan sangat ditentukan pula oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. (sc) foto: doc parle

# Pengarusutamaan Gender Di Indonesia

Peringatan Hari Kartini yang ke 132 April yang lalu, dapat digunakan sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi dan posisi perempuan Indonesia saat ini. Apakah cita-cita Kartini yang dikenal melalui konsep emansipasi antara laki-laki dan perempuan sudah terwujud?



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

Hal ini bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana, mengingat kondisi perempuan Indonesia sangat beragam. Terdapat berbagai dimensi yang harus dilihat, seperti politik, ekonomi, ketenagakerjaan, demografi, pendidikan, akses terhadap pelayanan, akses terhadap informasi, pandangan politik, dan etnisitas. Berbagai dimensi tersebut masih dapat dipilah lagi antara perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (*urban*) dengan perempuan yang tinggal di wilayah perdesaan (*rural*). Dengan beragamnya kondisi perempuan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh setiap perempuan juga berbeda, termasuk prestasi maupun upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perempuan Indonesia secara umum, seperti partisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan, tingkat kesehatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Apabila melihat kondisi perempuan saat ini, dapat dikatakan bahwa di beberapa bidang kehidupan, perempuan

Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Akan tetapi, di beberapa bidang lain masih diperlukan kerja keras agar kedudukan perempuan dapat lebih setara dengan laki-laki, dan akses serta partisipasi perempuan dapat lebih ditingkatkan.

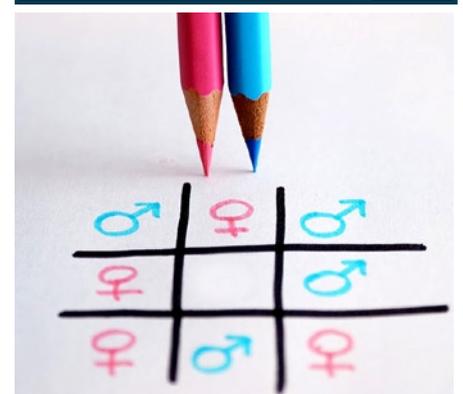
Dilihat dari aspek politik, partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan terus meningkat dari ke tahun. Hal itu antara lain terlihat dari jumlah perempuan yang menduduki kursi di lembaga legislatif. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR sebanyak 102 orang dari total 560 orang anggota DPR (18,04%). Adapun keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi sebesar 16% atau meningkat 6% dibanding pada periode sebelumnya yang masih 10%.

Sebaliknya, di bidang kesehatan, data menunjukkan bahwa kondisi perempuan relatif masih memprihatinkan. Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu indikator kualitas kesehatan perempuan saat ini masih sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia atau *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2010 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan bahwa penurunan AKI yang merupakan salah satu target dalam MDGs masih belum tercapai. Untuk mencapai AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sesuai target MDGs, masih diperlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Demikian pula di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. TPAK adalah rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK

pada tahun 2009 sebesar 68,86%. Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada perempuan yang menjadi TKI di luar negeri. Data Bank Dunia menunjukkan, sekitar 80% dari TKI adalah tenaga kerja wanita (TKW), dan 95% di antaranya bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga atau profesi lain yang sejenis. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terjadi kesenjangan gender (*gender gap*) dalam beberapa aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat terciptanya keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu strategi yang selama ini ditempuh untuk memperkecil kesenjangan gender adalah melalui *gender mainstreaming*/ pengarusutamaan gender (PUG).

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang



Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri No. 15 Tahun 2008.

Sebagai sebuah strategi, idealnya implementasi PUG dilakukan di semua institusi negara, agar keadilan gender sebagai tujuan akhir PUG dapat tercapai. Sebagai lembaga legislatif, melalui tiga fungsi yang diemban, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan, DPR memiliki peran penting dalam implementasi PUG. Di bidang legislasi, RUU tentang Keimigrasian yang baru disahkan beberapa waktu lalu, dapat dikatakan telah

berperspektif gender mengingat selama ini cukup banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan mengalami masalah yang berkaitan dengan ijin tinggal. Beberapa RUU dalam Daftar Prolegnas Tahun 2011 seperti RUU tentang Kesetaraan Gender dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga dapat dijadikan sebagai sarana optimalisasi PUG dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR.

Meskipun kesadaran tentang perlunya peningkatan keterlibatan perempuan secara signifikan di kalangan partai politik telah muncul, namun hal ini perlu ditegaskan kembali lewat peraturan yang lebih mengikat dan memiliki kekuatan hukum, supaya kesadaran tersebut tidak hanya menjadi retorika belaka. Langkah-langkah kongkrit yang perlu dilakukan antara lain: [1]

membuka kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berperan secara aktif dalam kepengurusan partai, melalui proses yang demokratis, adil dan transparan; [2] mempromosikan program-program yang dapat menarik pemilih perempuan, merekrut serta meningkatkan kemampuan memimpin dan berpolitik kader-kader perempuan partai, mendorong kader-kader perempuan partai untuk posisi-posisi kepemimpinan dalam partai dan menominasikan calon legislatif perempuan partai untuk ikut dalam pemilu; [3] merancang program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu-isu perempuan; [4] melaksanakan *affirmative action* untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam politik dan mendongkrak kontribusi perempuan dalam politik formal.\*\*\*

## DPR Dorong Kerjasama Energi Khususnya Nuklir Untuk Perdamaian

“Dimana-mana peran parlemen sangat besar. Posisi parlemen di Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan yang lalu apalagi jika antar parlemen sudah sepakat bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan dari pemerintah masing-masing,” papar Wakil Ketua BKSAP Azwar Abu Bakar saat menerima Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, (8/6).

Menurut Azwar, Iran merupakan negara mayoritas Islam yang sangat demokratis serta posisi dan pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah sangat besar. “Mudah-mudahan kita dapat menjadi penyeimbang atau mediasi antar negara atau kawasan,” paparnya.

Dia menambahkan, sejauh ini memang sudah ada Group Kerjasama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia- Iran sejak puluhan tahun silam.

“Sekarang memang sudah ada moratorium kunjungan kerja luar negeri namun untuk kerjasama bilateral tetap diperlukan,” paparnya.

Selain persoalan energi, lanjut Azwar, Iran sangat maju di bidang kedokteran seperti riset, stem cell dan

DPR mendorong peningkatan kerjasama di bidang energi dengan pemerintah Iran khususnya nuklir untuk tujuan perdamaian.



Wakil Ketua BKSAP Azwar Abu Bakar saat menerima Ketua Parlemen Iran Ali Larijani

sebagainya. Karena itu, DPR mengharapkan adanya kerjasama di bidang kedokteran antar kedua negara.

Dia menambahkan, kunjungan seperti GKSB antar kedua negara masih sangat berguna dan tetap dibutuhkan karena yang tadinya ada sumbatan pada tingkat eksekutif antar kedua negara bisa diselesaikan di tingkat lobi antar parlemen.

Azwar mencontohkan saat GKSB

mengunjungi Brazil ternyata industri peternakan sapi di Brazil sangat maju, bahkan jumlah ternaknya melebihi jumlah penduduknya. “Pertanian juga sangat maju dengan area yang sangat luas,” jelasnya.

Itu semua, teranginya, dapat menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk saling meningkatkan kerjasamanya di sektor perekonomian. (si) foto:si

# DPR Resmi Batasi Kunjungan Luar Negeri



Wakil Ketua DPR Pramono Anung

Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui surat yang telah ditandatangani pimpinan per tanggal 30 Mei 2011 resmi membatasi kunjungan kerja keluar negeri, terlebih kunjungan kerja yang tidak penting yang diselenggarakan komisi-komisi di DPR tanpa kejelasan tujuan dihentikan sementara.

“Surat sudah ditandatangani pimpinan per tanggal 30 Mei 2011. Kunker itu hanya diizinkan yang berkaitan dengan revisi UU yang kita perlukan. Untuk UU yang bersifat biasa, maka tidak diizinkan,” jelas Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, dihadapan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa sejumlah kunjungan yang dipandang penting masih diagendakan, misalnya kunker BKSAP dalam rangka membina hubungan diplomasi dengan parlemen negara tetangga.

Pramono menambahkan, selain BKSAP, Muhibah serta Grup Kerjasama Bilateral, diluar yang disebutkan, pimpinan DPR menginstruksikan kunker di stop dulu karena banyak yang belum memberikan laporan.

Pembatasan kunjungan keluar negeri menurut Pramono dilakukan untuk menjawab kritik dari masyarakat, mengingat banyak kunjungan keluar negeri yang dilakukan oleh DPR diluar konsep yang seharusnya.

“Ini menjadi prioritas utama pimpinan ini karena kegundahan publik memang patut didengarkan. Surat yang sudah ditandatangani sudah dikirim ke pimpinan fraksi dan pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan” tandasnya.(nt) foto:doc parle

# DPR Minta Menag Tingkatkan Anggaran tangkal Radikalisme

Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama meningkatkan anggaran untuk fungsi agama dalam rangka menangkal radikalisme, orientasi dan sikap keberagamaan yang menyimpang.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, di Gedung Nusantara II, Senin, (6/6).

Menurut Karding, peningkatan anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan di Kementerian Agama RI khususnya pada fungsi agama dan pendidikan seperti mening-

katkan kualitas dan kesejahteraan guru.

Dia menambahkan, Komisi VIII DPR juga mendesak Menag untuk memprioritaskan programnya pada daerah terpencil, tertinggal dan pemekaran. selain itu, lanjutnya, mendorong Kementerian Agama RI untuk memberikan pelayanan (pendidikan dan perkawinan) kepada WNI diluar negeri melalui pembentukan atase agama di negara-negara tertentu. (si/iwfotoiw/



Ketua Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding

# Persoalan Kerjasama Energi Jadi Fokus DPR RI

**M**arzuki mengatakan, dirinya juga mempertanyakan perkembangan proyek Pemerintah Indonesia mengenai kerjasama industri pupuk dengan Iran. Pasalnya, sampai sejauh ini belum masuk tahap implementasi dari program kerjasama tersebut. “selain itu ada proyek yang sudah ditandatangani seperti refinery minyak dan gas juga belum ada tindak lanjutnya,” tanyanya kepada Ketua Parlemen Iran.

Saat ini hubungan politik Indonesia dengan Iran sangat baik dibandingkan dengan hubungan atau kerjasama ekonomi antar kedua negara. “DPR melihat potensi kedua negara sangat besar namun kedua negara belum mampu mengembangkan secara maksimal potensi ekonominya,” katanya.

Menurut Marzuki, DPR telah meminta pemerintah untuk mendorong implementasi kerjasama dengan Iran. Namun masih adanya kekhawatiran terhadap proses kerjasama itu. “Ternyata Cina dan Turki lebih mampu memanfaatkan potensi ekonomi Iran dibandingkan Indonesia,” ujarnya.

Selain persoalan energi, lanjut Marzuki, dirinya mengharapkan adanya peningkatan kerjasama di sektor pariwisata karena selama ini perkembangan turis Timteng ke Indonesia

DPR mendukung terciptanya komunikasi intensif antara Komisi VII DPR yang membidangi ESDM, Ristek dan LH dengan Komisi Energi di Parlemen Iran. “melalui komunikasi diharapkan dapat membawa kemaslahatan antar kedua negara,” jelas Ketua DPR Marzuki Alie, saat menerima Ketua DPR Iran Ali Larijani, di Gedung Nusantara III, Kamis, (9/6).

masih jauh dari harapan padahal Indonesia memiliki wisata religi sebagai objek unggulannya.

Menyinggung perkembangan politik di Timteng yang memanas, Marzuki menambahkan, DPR menyesalkan adanya campur tangan negara arab yang didukung oleh AS dimana seharusnya mereka dapat menyelesaikan konfliknya secara internal dengan konsep ukhuwah islamiyah. “Bersyukur saat ini sudah mulai tercipta persatuan dan kesatuan antara hamas dan fatah itu menunjukkan adanya usaha bersama mendorong kearah perdamaian,” jelasnya.

Dia menambahkan, dirinya mengajak delegasi Parlemen Iran untuk berpartisipasi pada Sidang PUIC di Palembang tahun depan. selain itu, dirinya mengharapkan keterlibatan parlemen Iran maupun sesama parlemen negara yang tergabung di PUIC untuk mengunjungi Jalur Gaza sebagai

bentuk misi kemanusiaan dan harapan terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.

Sementara Ketua DPR Iran Ali Larijani mengatakan, potensi kedua negara sangat potensial karena itu, Iran mengharapkan adanya peningkatan kerjasama pada sektor minyak. Disisi lain, Iran meminta Indonesia memberikan dorongan pada sektor pariwisata sehingga diharapkan kunjungan wisatawan Iran ke Indonesia semakin meningkat maupun sebaliknya. “Untuk bidang Iptek memang sudah ada kerjasama namun harus terus ditingkatkan kedepannya,” jelasnya.

Dia mendukung terciptanya hubungan bilateral antar parlemen melalui pembicaraan antara Komisi Energi di Iran dengan Komisi VII DPR. selain itu juga pada bidang Pertahanan, dan kesehatan. Sehingga dapat mendorong terciptanya peluang antar kedua negara. (si) foto: si/doc Parle



Ketua DPR Marzuki Alie, saat menerima Ketua DPR Iran Ali Larijani, di Gedung Nusantara III DPR



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima 250 pelajar dari seluruh tanah air yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia, di Operation Room, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011. foto:JW

